

Investor Daily/ANT

**Bank Wakaf Mikro**

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso (kiri) menyerahkan cinderamata saat meresmikan Bank Wakaf Mikro Bangkit Nusantara di Pondok Pesantren Roulatut Thalibin, Rembang, Jawa Tengah, Kamis (9/1/2020). OJK mencatat hingga akhir tahun 2019 telah berdiri 56 Bank Wakaf Mikro di seluruh Indonesia dengan kumulatif penerima manfaat sebanyak 25.631 nasabah dan total pembiayaan Rp33,92 miliar.

RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Rampung 95%

Oleh **Arnoldus Kristianus**

► **JAKARTA** - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja yang menggunakan skema *omnibus law* bakal diserahkan seusa masa reses DPR yang jatuh pada 16 Januari 2020. Adapun saat ini, berkas RUU tersebut sudah rampung 95%.

"Semua poin-poin harus sudah selesai. Ini sudah 95% tinggal finalisasi saja," ucap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (9/1).

Sejauh ini, pemerintah melalui kementerian/lembaga (KL) melakukan pembahasan finalisasi RUU Cipta Lapangan Kerja. "Kami berharap nanti reses dapat Prolegnas masuk, Surpres (Surat Presiden) sudah harus masuk. Kami sedang finalisasi terakhir," ucap Yasonna.

Ia mengatakan, pemerintah melibatkan para buruh dalam proses pembahasan sampai penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sehingga hasilnya bisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. "Ada tim yang mengerjakan untuk menyampaikan ke serikat

buruh mengenai konsep yang kami kita atur. Sebab, (*omnibus law*) ini untuk menciptakan lapangan kerja," tutur Yasonna.

Menurut dia, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan mampu menciptakan perubahan yang signifikan dalam investasi dan penciptaan lapangan kerja sehingga masyarakat Indonesia dapat lebih mudah dalam mendapat pekerjaan. "UU Omnibus Law selesai akan ada satu perubahan fundamental dalam investasi penciptaan lapangan kerja sehingga memudahkan orang bekerja," ucap Yasonna.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Soesiwijono Moegiarso mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir pihaknya sudah berdiskusi dengan 31 kementerian dan lembaga (K/L). Naskah RUU masih digodok pemerin-

tah, setelah naskah jadi baru pemerintah mengajak diskusi kami ke seluruh pihak.

"Kami juga mau menjelaskan ke seluruh pihak tetapi proses pembahasan berjalan dinamis. Serta akan melibatkan asosiasi dan seluruh pihak terkait. Kami sedang menyiapkan ruang diskusi disana," ucap Soesiwijono.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menjadi penanggungjawab di level kebijakan. Sedangkan Sesmenko Soesiwijono menjadi penanggungjawab dalam operasional. Progres RUU ini terus disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Joko Widodo.

"Sudah ada arahan dalam ratas, tetapi kami harus mendetailkan mulai dari teknis sampai pasal-pasal yang ada," ucapnya.

Awal pekan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan harapannya agar draf *omnibus law* atau RUU *omnibus* rampung dibahas pekan ini atau paling lambat pekan depan untuk kemudian disampaikan ke DPR RI.

"Penyelesaian yang berkaitan dengan *omnibus law* saya harap bisa selesai dalam minggu-minggu ini atau paling lambat minggu depan," kata Presiden Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (6/1).

Sebelumnya, dalam rapat

terbatas di Istana Bogor, pada 27 Desember 2019, Presiden menargetkan draft RUU tersebut dapat disampaikan kepada DPR pada Pertengahan Januari 2020.

Visi Besar

Omnibus law adalah suatu undang-undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat membuat atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.

"Saya tidak ingin RUU ini hanya menjadi tempat menampung keinginan-keinginan kementerian dan lembaga. Jangan sampai hanya menampung, menampung, menampung tapi tidak masuk ke visi besar yang saya sampaikan," kata dia. Untuk itu, Presiden pun meminta jajarannya untuk terus mengkaji dan membahasnya sebelum kemudian disampaikan ke DPR.

"Saya minta setelah nanti ini kita bicarakan, tolong didalam, dipimpin Menko Perekonomian, Menkumham, Mensesneg, Seskab untuk mendalami dan nanti disampaikan ke DPR setelah tanggal 10 Januari," kata dia.

RUU tersebut menyangkut 11 klaster yang melibatkan 30 kementerian dan lembaga. "Saya minta visi besar dan *framework*-nya harus memiliki fokus yang jelas agar dijaga konsistennya, harus betul-betul sinkron, terpadu," kata Presiden Jokowi.

TINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN

Erick akan Bentuk *Holding* Rumah Sakit dan Satukan Hotel BUMN

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan melanjutkan pembentukan *holding* rumah sakit anak usaha BUMN. Setelah *holding* rumah sakit terbentuk, perusahaan tersebut diarahkan menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pembentukan *holding* rumah sakit ditujukan supaya badan usaha yang memiliki rumah sakit bisa fokus kepada bisnis utama. Seperti PT Pertamina (Persero), yang harus fokus pada bisnis minyak dan gas (migas).

"Fokus utama Pertamina adalah migas, Pertamina punya 25 sumur yang harus dieksplorasi. Saat ini *lifting* minyak tengah turun, *nah kami nggak mau ada auto-fokus*" ujar dia ditemui di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/1).

Selain membentuk *holding* rumah sakit, Kementerian BUMN juga berencana memasukkan semua hotel yang menjadi anak-anak perusahaan BUMN melantai di bursa. Hal ini untuk menjaga tata kelola perusahaan dengan *go public*, sehingga semua orang bisa mengawasi, tak hanya dari internal Kementerian

BUMN.

Kendati begitu, Erick mengatakan masih mengkaji dan mengkonsolidasikan skema *holding* rumah sakit secara matang, agar bisnis menjadi progresif dan bisa bersaing. Selain itu, saat ini Erick juga belum memiliki hitungan jumlah rumah sakit yang akan menjadi anggota *holding* dan belum menentukan perusahaan mana yang akan menjadi induk.

"Ya strukturnya masih dibahas, yang penting akan ada *holding* rumah sakit. Pemiliknya nanti para BUMN-BUMN yang punya rumah sakit. Gitu kan. *Nah*, nanti ini bisa kami tingkatkan servisnya dan ekspersinya," ujar dia.

Di sisi lain, ia mengatakan, pembentukan *holding* rumah sakit nantinya juga harus disertai dengan peningkatan pelayanan dan keahlian agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Sebab catatannya selama ini defisit transaksi berjalan (*current account deficit*) pada bidang kesehatan cukup tinggi, yaitu mencapai US\$ 6 miliar.

Hal itu, lanjut dia, dikarenakan banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih melakukan pemeriksaan kesehatan di luar negeri. "Nah ini 'kan yang musti

kita tingkatkan. Rumah sakit BUMN ini bisa kita tingkatkan, yang bisa dipercaya dan terkemuka," tegas dia.

Meski mengembangkan *holding* rumah sakit, ia memastikan tidak akan mematikan bisnis rumah sakit swasta, namun harus tetap bersaing. Apalagi dia mengungkapkan bahwa rumah sakit milik BUMN sejauh ini memiliki pendapatan sebesar Rp 5 triliun per tahun. Ke depan, apabila di-*holding*-kan maka pendapatan tersebut bisa bertambah semakin besar.

"Rumah sakit BUMN sendiri punya *revenue*, kalau dikonsolidasikan sekitar Rp 5 triliun *revenue*-nya. *Nah*, ini kan cukup potensi, sayang kan kalau tidak difokuskan jadi ekspertis. Jadi nantinya tidak perlu dibawah Pelni, Pertamina, Pelindo. Pelindo bisnisnya ada yang lebih pasti *kok*, perkalapan, pelabuhan dan lain-lain *kok*" tutur Erick.

Adapun saat ini Kementerian BUMN tengah mengevaluasi seluruh perusahaan pelat merah diantaranya dengan menggabungkan anak hingga cicit usaha BUMN yang bergerak tidak sesuai fokus utamanya dari induk bisnis atau bisnis inti (*core business*). (try)

Kadin Ingin Isu Ketegangan di Natuna dan Ekonomi Dipisahkan

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengharapkan hubungan pemerintah Indonesia dan Tiongkok yang memanas di perairan Natuna, Kepulauan Riau, tidak berimbas terhadap investasi. Oleh karena itu, Kadin berharap ada garis pemisah yang tegas antara persoalan Natuna dan ekonomi, termasuk hubungan investasi kedua negara.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, permasalahan di perairan Natuna bisa berdampak terhadap kegiatan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, bila masing-masing pihak menyikapi secara salah.

"Kalau kita tidak mau ada *spill over* negatif dari isu Natuna ke hubungan perdagangan dan investasi Indonesia-Tiongkok, kita harus membuat garis pemisah yang tegas di antara keduanya," ucap Shinta kepada *Investor Daily*, Kamis (9/1).

Di sisi lain ia mengatakan, isu perbatasan jangan dicampuraduk menjadi isu ekonomi, apalagi menjadi sentimen anti-Tiongkok seperti yang terjadi antara Korea-Jepang. "Pemerintah Indonesia juga mengatasinya dengan cara yang tegas tetapi dengan kepala dingin," tutur dia.

Ia menilai langkah Tiongkok dalam menyelesaikan masalah Natuna dengan Indonesia berbe-

da dengan AS yang lebih sering dan lebih mudah menggunakan instrumen embargo ekonomi untuk meng-*enforce* kepentingan politiknya.

"Ini terbukti dalam konteks sengketa Spratley Islands yang disengketkan antara Vietnam, Malaysia, Filipina dan Tiongkok. Meskipun putusan UNCLOS berpihak pada Filipina, kegiatan ekonomi Tiongkok-Filipina tetap berjalan biasa," jelas dia.

Kondisi seperti ini yang harus dipertahankan dan dijaga sehingga kegiatan ekonomi bilateral kita tetap berjalan seperti biasa berdasarkan mekanisme pasar.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, permasalahan Natuna dan investasi Tiongkok di Indonesia merupakan hal yang berbeda. "Natuna itu kalau ada pelanggaran, biarlah aparat penegak hukum yang menyelesaikannya. Sedangkan investasi adalah kewajiban BKPM untuk meyakinkan investor RRT di mana pun bahwa iklim kondisi investasi sudah ada perubahan dan akan jauh lebih baik ke depan," tegas Bahlil.

Ia mengatakan, fokus Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah melakukan transformasi ekonomi, dimana pintu masuknya adalah datangnya investasi ke Indonesia. Oleh karena itu, Bahlil optimistis potensi pertumbuhan ekonomi pada 2020 akan

jauh lebih baik.

"Saya yakin ke depan pertumbuhan investasi di Indonesia akan terus meningkat, termasuk investasi RRT ke Indonesia", tambah Bahlil.

Adapun dalam lima tahun terakhir (2014-kuartal III-2019), investasi RRT merupakan sumber investasi terbesar ke-3 di Indonesia, setelah Singapura dan Jepang, dengan total realisasi investasi sebesar US\$ 13,1 miliar. "Tapi yang penting, yang kita butuhkan investasi dapat berkolaborasi dengan pengusaha nasional. Jadi, setiap investasi sekarang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja," ujar dia.

Bahlil menekankan investasi asing yang masuk ke Indonesia juga harus memaksimalkan penggunaan tenaga kerja lokal. "Harus ada azas kebersamaan dan saling menguntungkan kedua belah pihak," tegas Bahlil.

Di sisi lain ia tak menampik bahwa proses perizinan masih menjadi hambatan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Jokowi langsung menginstruksikan BKPM untuk mengkoordinasikan percepatan perizinan, sehingga dapat memberikan iklim investasi yang positif. "BKPM selalu meyakinkan bahwa dibawah pemerintahan saat ini, kita akan mempermudah dan memberikan kepastian dan insentif bagi investor", ucap dia. (try)

Belanja Terarah APBN 2019 Ikut Turunkan Tingkat Kemiskinan

JAKARTA - Tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2019 turun menjadi 9,41% dari setahun sebelumnya yang tercatat 9,82%. Sedangkan koefisien gini membaik dari 0,389 pada Maret 2018 menjadi 0,382 pada Maret 2019. Capaian positif pada 2019 tersebut akan menjadi dasar untuk menopang langkah pembangunan 2020.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai, penurunan kemiskinan ini juga tidak lepas dari belanja pemerintah yang juga memberikan perlindungan kepada masyarakat. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan di banyak negara, APBN 2019 didorong ekspansif dan *countercyclical* untuk menjalankan peran strategis dalam menjaga stabilitas makroekonomi, mempertahankan momentum pertumbuhan perekonomian domestik, dan mendorong laju kegiatan dunia usaha.

"Kebijakan kita akan terus mendorong dan menjadi *countercyclical* yang efektif untuk menjaga momentum ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi kita, kebijakan fiskal tentu akan terus kita koordinasikan

dengan kebijakan moneter bersama-sama untuk bisa menjaga perekonomian," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Laporan APBN Tahun 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/1).

Lebih jauh, ia memaparkan, realisasi belanja negara pada 2019 mencapai Rp 2.310,2 triliun (93,9% dari target APBN 2019), atau tumbuh 4,4% dari realisasinya di tahun 2018. Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 876,4 triliun (102,4% dari target APBN 2019).

Kinerja penyerapan belanja K/L yang cukup tinggi tersebut, kata Menkeu, antara lain dipengaruhi oleh adanya tambahan belanja pegawai oleh kebijakan kenaikan gaji 5% dan kenaikan tunjangan kinerja beberapa K/L, kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan penambahan anggaran penanggulangan bencana.

Selain itu, terdapat pelaksanaan berbagai program dan agenda strategis pemerintah seperti pemilihan umum (Pemilu), dan kebijakan kenaikan indeks manfaat Program Keluarga Harapan

(PKH) untuk mendukung percepatan pengurangan kemiskinan.

Sementara itu, realisasi belanja non-K/L sebesar Rp 622,6 triliun (79,9% dari target APBN 2019), antara lain terdiri atas pembayaran bunga utang Rp 275,5 triliun dan subsidi sebesar Rp 201,8 triliun. Realisasi subsidi relatif lebih kecil dari pagu APBN 2019 antara lain dipengaruhi oleh lebih rendahnya harga Indonesia Crude Price (ICP), menguatnya nilai tukar rupiah, serta penajaman alokasi subsidi pupuk.

Realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 811,3 triliun (98,1% dari target APBN 2019), lebih tinggi 7,1% dari realisasi di tahun 2018.

Pencapaian realisasi TKDD tersebut antara lain dipengaruhi oleh penyelesaian sebagian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan 2018, adanya kebijakan penyaluran DAU tambahan untuk pembayaran kenaikan iuran jaminan kesehatan penduduk yang didafarkan oleh pemerintah daerah dan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana TKDD. (ns)

Pemerintah Optimistis Investasi dari Tiongkok Tetap Tumbuh

JAKARTA - Pemerintah optimistis investasi tetap meningkat meskipun hubungan Indonesia dan Tiongkok sedang kurang harmonis karena permasalahan batas wilayah di perairan Natuna. Begitu juga di tengah perlambatan ekonomi global pemerintah terus mendorong investasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

"Kita bicara investasi saja. Sampai sekarang belum ada gejala yang menyatakan akibat perselisihan Natuna kemudian investasi China menurun," ucap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/1).

Bahlil mengatakan, permasalahan Natuna dengan kondisi investasi merupakan hal yang berbeda. Jika terjadi pelanggaran kedaulatan pemerintah akan bertindak sesuai dengan regulasi yang ada. Baik itu melalui aparat keamanan maupun penyelesaian secara diplomasi antara kedua negara.

"Investasi tidak berhubungan dengan kedaulatan negara. Tidak ada dalam satu klausul negosiasi investasi itu kalau kita lakukan investasi, boleh kamu ganggu negara saya atau saya ganggu negara kamu," ucap Bahlil.

Ia meyakini, potensi pertumbuhan ekonomi pada 2020 ini akan jauh lebih baik. Termasuk investasi Tiongkok di Indonesia. Selama 5 tahun terakhir (2014-kuartal III-2019), investasi RRT merupakan sumber investasi terbesar ke-3 di Indonesia, setelah Singapura dan Jepang, dengan total realisasi investasi sebesar US\$ 13,1 miliar. BKPM juga terus mendorong agar investasi asing yang masuk bisa melibatkan sebanyak mungkin pengusaha sampai tenaga kerja lokal.

"Jadi setiap investasi sekarang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja. Boleh berinvestasi tetapi harus memaksimalkan penggunaan tenaga kerja lokal. Harus ada azas kebersamaan dan saling menguntungkan kedua belah pihak," ucap Bahlil. (ark)



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

PENGUMUMAN**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari **Selasa, tanggal 18 Februari 2020**.

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("POJK"), Perseroan dengan ini pula menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pemanggilan Rapat akan dilakukan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada hari **Senin, tanggal 27 Januari 2020**.
- Pemegang saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari **Jumat, tanggal 24 Januari 2020** pukul **16.15 WIB**.
- Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat dengan memenuhi Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) POJK. Usulan tersebut dibuat tertulis oleh pemegang saham dan diterima secara patuh oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Senin, tanggal 20 Januari 2020** pukul **16.15 WIB**.

Jakarta, 10 Januari 2020
Direksi Perseroan